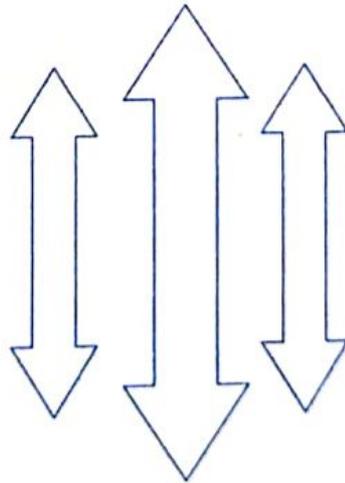




**PERATURAN DESA KATONGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DESA KATONGAN  
KECAMATAN NGLIPAR  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**



**KEPALA DESA KATONGAN  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

**PERATURAN DESA KATONGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KATONGAN**

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Katongan Nomor 9 Tahun 2019;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 57);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor ...);

22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2019 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 Nomor ... );
23. Peraturan Desa Katongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Katongan Tahun 2019 - 2025;
24. Peraturan Desa Katongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Katongan Tahun 2020;
25. Peraturan Desa Katongan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KATONGAN  
 Dan  
 KEPALA DESA KATONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KATONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.015.909.200,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.068.660.051,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (52.750.851,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 52.750.851,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 52.750.851,-
SILPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud ayat 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. Daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD dan Camat.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Katongan.

Ditetapkan di : Katongan

Desa Tanggal : 31 Desember 2019

Kepala Desa



Diundangkan di : Katongan

Pada Tanggal : 31 Desember 2019

Sekretaris Desa



Lembaran Desa Katongan Tahun 2019 Nomor 11

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KATONGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1	Pendapatan Asli Desa	238.717.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.784.182.700,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	15.009.500,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.018.909.200,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1	Belanja Pegawai	574.197.872,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	495.798.379,00	
5.3	Belanja Modal	998.878.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.068.874.251,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(52.750.851,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	52.750.851,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	52.750.851,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>52.750.851,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Katongan, 21 Desember 2019

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KATONGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	236.737.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.764.162.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.009.500,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.015.909.200,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>900.316.592,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>639.551.592,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	447.095.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	447.095.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.852.672,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	45.852.672,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	23.170.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.170.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.450.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	42.250.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.560.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.560.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.900.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.900.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	12.523.920,00	ADD, PAD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.523.920,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>15.210.000,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.800.000,00	ADD, DLL, PAD, I
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	1.000.000,00	ADD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan mebeleur	5.000.000,00	ADD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.410.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.410.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	1.000.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>6.150.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.250.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	2.250.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	2.650.000,00	PBH
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>9.505.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.880.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.880.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.175.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.175.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.350.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.100.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>229.900.000,00</b>	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	225.000.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	4.900.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>939.151.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>9.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>38.750.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	13.700.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	14.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	2.650.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	2.000.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>832.851.000,00</b>	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	600.000,00	DLL
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	543.754.000,00	DDS PRK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	543.754.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	61.006.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	61.006.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	227.491.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	227.491.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>58.550.000,00</b>	
2.4.90		Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa	38.500.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	38.500.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	20.050.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.050.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>59.800.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>2.500.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.500.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>38.200.000,00</b>	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	8.600.000,00	DLL
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	3.000.000,00	ADD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	24.600.000,00	ADD, DLL, PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	2.000.000,00	DLL
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>9.000.000,00</b>	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	6.000.000,00	DLL
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.000.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>10.100.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	1.850.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	3.000.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.000.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.250.000,00	DLL, PAD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>167.425.012,00</u></b>	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>26.770.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	26.770.000,00	DDS, DLL
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.770.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>18.730.012,00</b>	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	15.730.012,00	DLL, PAD
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.730.012,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	3.000.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>121.925.000,00</b>	
4.6.90		Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	121.925.000,00	DDS
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	121.925.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>1.967.447,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>1.967.447,00</b>	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.967.447,00	ADD, DLL, PAD, F
5.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.967.447,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.068.660.051,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(52.750.851,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	52.750.851,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>52.750.851,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	





PEMERINTAH DESA KATONGAN  
KECAMATAN NGLIPAR  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Jl. Nglipar – Ngawen Km.05, Katongan, Nglipar, Gunungkidul, D. I. Yogyakarta

PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KATONGAN  
DAN  
KEPALA DESA KATONGAN  
TERHADAP PERATURAN DESA KATONGAN NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)  
DESA KATONGAN KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : 11/BPD/2019

NOMOR : 11/Perdes/2019

Pada hari ini **selasa** tanggal **tiga puluh satu** bulan **desember** tahun **dua ribu sembilan** bertempat di Balai Desa Katongan Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul pada acara Rapat Paripurna BPD dan Pemerintah Desa Katongan menyetujui bersama terhadap: **PERATURAN DESA KATONGAN NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

Naskah peraturan desa sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat di Katongan dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Katongan dan Kepala Desa Katongan.

Ketua BPD  
SAMI HARTO WIHABIO

Ketua Desa Katongan  
JUSMAWAN



PEMERINTAH DESA KATONGAN  
KECAMATAN NGLIPAR  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Jl. Nglipar - Ngawen Km.05, Katongan, Nglipar, Gunungkidul, D. I. Yogyakarta

DAFTAR HADIR

SIDANG BERSAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
PERATURAN DESA KATONGAN NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Desember 2019

Tempat : Balai Desa Katongan

No	Nama	Jabatan	TandaTangan
1	SAMADI HARTO WIHARJO	Ketua BPD	1.
2	SUROTO, S.Sos	Wakil Ketua BPD	2.
3	SUKIRMANTORO, SPd	Sekretaris BPD	3.
4	TUKARJO	Kabid Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan BPD	4.
5	WASIAT	Kabid Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat BPD	5.
6	SUKIMIN	Anggota BPD	6.
7	KISMI SULJANA, AMK. AK	Anggota BPD	7.
8	SAMTA	Anggota BPD	8.
9	RINA SRI LISTIANA	Anggota BPD	9.
10	JUMAWAN	Kepala Desa	10.
11	HARINO	Sekretaris Desa	11.
12	IMAN SANTOSA	Kasi Pemerintahan	12.
13	NGATIJO	Kasi Kesejahteraan	13.
14	WAWAN GUNARJO, SPdI	Kasi Pelayanan	14.

15	AZEF KURNIAWAN	Kaur TU dan Umum	15... <i>[Signature]</i>
16	MURTINI	Kaur Keuangan	16... <i>[Signature]</i>
17	YUNIARTI	Kaur Perencanaan	17... <i>[Signature]</i>
18	SUDIANTO	Staf Kasi Pemerintahan	18... <i>[Signature]</i>
19	SUMIJA	Staf Kasi Kesejahteraan	19... <i>[Signature]</i>
20	RIKA DWI KURNIAWATI	Staf Kasi Pelayanan	20... <i>[Signature]</i>
21	SUNARNO	Staf Kaur TU dan Umum	21... <i>[Signature]</i>